

Efektifitas Pembangunan Pada Sektor Pariwisata Pantai Sawai Di Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

Telly Muriany

Universitas Darussalam Ambon Indonesia

e-mail: tellymuriany@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Sektor Pariwisata juga menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Desa Sawai terletak di pesisir utara Pulau Seram dan merupakan salah satu pintu masuk sebelah utara ke Taman Nasional Manusela. Memiliki keindahan alam yang terawat dan terjaga menjadikan desa wisata ini menarik untuk dikunjungi. Sejauh ini pembangunan yang dilaksanakan di pantai Sawai ialah home stay dan ruang ganti. Home stay telah difungsikan, namun untuk ruang ganti belum di fungsikan, permasalahan pembangunan, pengelolaan serta fasilitas kawasan pariwisata di pantai Sawai. Tujuan penelitian utama bagaimana Tingkat Efektifitas Pembangunan Pada Sektor Pariwisata di Pantai Sawai. Metode penelitian yaitu kajian kualitatif deskriptif . Hasil peneltian Menunjukkan Pemerintah Negeri Sawai belum optimal dalam rangka memanfaatkan sumber daya pariwisata pantai Sawai khususnya sarana dan prasarana penunjang, Masih rendahnya dukungan pemerintah Kabupaten khususnya instansi terkait dalam menunjang sarana prasarana penunjang dimaksud, serta pendampingan dalam pengelolaan, Sosialisasi dan publikasi objek wisata masih belum optima,. Penguatan Kapasitas Pemerintah negeri dalam menunjang pengembangan dan pengelolaan parawisata laut dan pantai, Partisipasi Masyarakat dalam menunjang pengembangan parawisata sebagai sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Efektifitas, Pembangunan Pariwisata

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan (Agung K. Henaulu et al., 2016). Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan.

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kegiatan ini diberlakukan salah satunya atas dasar karena masyarakat daerah memiliki modal yang dapat di andalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya adalah melalui kegiatan pariwisata. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis, sosial dan budaya (Ely et al., 2020).

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung di dalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Oleh karena itu objek-objek wisata perlu membutuhkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dari sisi pengembangannya, selain merupakan kekayaan alam juga sebagai potret daerah yang harus dilestarikan dan dipelihara keberadaannya (A K Henaulu et al., 2020).

Untuk memudahkan pengembangan pariwisata nasional, maka pemerintah mengambil langkah strategis dengan menyerahkan pembinaanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar lebih memudahkan pengembangan dan koordinasi pembangunan daerah. Pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga swasta telah berusaha membangun area rekreasi semampunya mungkin dengan memanfaatkan lahan, didukung oleh daya dan dana yang ada untuk penyaluran kebutuhan akan rekreasi tersebut.

Berdasarkan UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah dan juga tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan selaras (Mingkid et al., 2017).

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan .

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigm*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha

pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global (Agung K. Henaulu et al., 2016).

Kegiatan wisata di sebuah wilayah tidak lengkap tanpa adanya daya tarik wisata atau *tourist attraction*. Daya tarik wisata merupakan fokus utama pergerakan pariwisata di sebuah destinasi. Dalam artian, daya tarik wisata sebagai penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat, serta daya tarik wisata juga menjadi fokus orientasi bagi pembangunan wisata terpadu (Ismiyanti, 2010)

Desa Sawai terletak di pesisir utara Pulau Seram dan merupakan salah satu pintu masuk sebelah utara ke Taman Nasional Manusela. Selain itu desa Sawai juga merupakan salah satu kawasan prioritas bagi pengembangan wisata di Kabupaten Maluku Tengah. Desa Sawai dan sekitarnya ditetapkan sebagai daerah pengembangan wisata karena memiliki potensi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) antara lain berupa keanekaragaman flora dan fauna, keindahan alam, keaslian budaya tradisional, sejarah dan kondisi masyarakat sekitar.

Memiliki keindahan alam yang terawat dan terjaga menjadikan desa wisata ini menarik untuk dikunjungi. Lautnya yang tenang serta jernih, berwarna kebiruan sehingga pemandangan ikan-ikan kecil dan biota laut terlihat dengan jelas.

Sejauh ini pembangunan yang dilaksanakan di pantai Sawai ialah *home stay* dan ruang ganti. Home stay telah difungsikan, namun untuk ruang ganti belum di fungsikan. Sehubungan dengan pembahasan diatas dan dikaitkan dengan

pembangunan pariwisata di pantai Sawai, terlihat masih jauh dengan yang di harapkan, karena berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa permasalahan pembangunan, pengelolaan serta fasilitas kawasan pariwisata di pantai Sawai yakni:

- a) *Home stay* untuk wisatawan belum efektif.
- b) Ketidak tersedianya toilet di lokasi pantai.
- c) Masalah ruang ganti.
- d) Lahan parkir kendaraan yang tidak memadai.
- e) Kebersihan lokasi pantai yang tidak efisien karena sampah.
- f) Keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan..
- g) Kesadaran masyarakat akan kelestarian sumber daya pariwisata (pantai).

Dengan beberapa indikasi yang dikemukakan di atas maka persoalan utama adalah Bagaimana Tingkat Efektifitas Pembangunan Pada Sektor Pariwisata di Pantai Sawai.

1.2. KAJIAN PUSTAKA

1.2.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu,

biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. (Ali et al., 2019).

Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (Ali et al., 2019).

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well* (Silalahi, 2011).

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2015).

Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri. Dari beberapa uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas

suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

1.2.2. Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah belaka. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Salampessy & Kaisupy, 2020).

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan juga adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan

selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat Harun, 2017)

Mardikanto & Soebiato, (2012) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

1.2.3. Pariwisata

Pariwisata diartikan sebagai rangkaian aktivitas dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukan hanya sementara waktu saja dan meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis atau maksud lainnya (Sugiama, 2021).

Lelloltery et al., (2016) Ekowisata (*eco-tourism*) disebutkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 16 sebagai kelompok-kelompok obyek dan daya tarik wisata, yang diperkuat -oleh perpu No. 18 tahun 1994, sebagai perjalanan untuk menikmati gejala keunikan alam di taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam.

Istilah ekowisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak berkali-kali, atau berputar-putar,

sedangkan wisata artinya perjalanan atau berpergian. Jadi ekowisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali, berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain (Ely et al., 2020).

ada lima unsur industri pariwisata yang sangat penting, yaitu (Dewi Kusuma Sari, 2011; Agung K. Henaulu et al., 2016):

1) *Attractions* (daya tarik)

Attractions dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanendengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerahtujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.

2) *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan.

Fasilitas-fasilitas dan jasa pelayanan yang diperlukan untuk pengembangan objek wisata, antara lain meliputi:

- a) Operasional tour dan travel,
- b) Restoran, kafe dan tempat sejenis lainnya,

- c) Toko atau penjual barang-barang kerajinan, souvenir dan kebutuhan sehari-hari,
 - d) Bank, money changer, serta fasilitas jasa keuangan lainnya,
 - e) Kantor informasi objek wisata,
 - f) Jasa layanan pribadi,
 - g) Fasilitas dan jasa pelayanan kesehatan,
 - h) Fasilitas keamanan (kantor polisi),
 - i) Fasilitas kemudahan masuk dan keluar area wisata & imigrasi.
- 3) *Infrastructure* (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata. Sebagai pelengkap, infrastruktur antara lain:

- a) Air, Listrik, Telekomunikasi,
 - b) Persampahan dan Pembuangan Limbah.
- 4) *Transportations* (transportasi)

Dalam objek wisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

Fasilitas dan jasa layanan transportasi, antara lain meliputi:

- a. Akses transportasi masuk ke area pengembangan,
- b. Sistem transportasi internal penghubung lokasi wisata dan area pengembangannya,
- c. Transportasi dalam area pengembangan,
- d. Semua jenis fasilitasi dan layanan yang berkaitan dengan transportasi darat, air dan udara.

5) *Hospitality* (keramahtamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

Pengertian objek wisata adalah sumberdaya alam, buatan dan budaya yang berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan. Pada umumnya daya tarik wisata menurut Suwontoro (2001) dipengaruhi oleh :

- a) Adanya sumber atau objek yang dapat menimbulkan rasa senang, nyaman, dan bersih.
- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjungi.
- c) Adanya arti khusus yang bersifat langka.
- d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.

Objek wisata alam mempunyai daya

tarik yang tinggi karena keindahannya, seperti keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.

Perkembangan pariwisata berpengaruh positif terhadap perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restaurant, warung, pedagang asongan, sarana dan olahraga, jasa dan lain-lain.

Pertumbuhan pariwisata telah mampu memberikan berbagai keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada berbagai wilayah pesisir. Kecenderungan wisatawan untuk menikmati wisata di wilayah pesisir telah mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut, mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti peningkatan fasilitas dan aksesibilitas.

1.3. METODE PENELITIAN

Jenis kajian adalah kualitatif deskriptif berlokasi Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Pejabat Kepala Negeri Sawai Sementara informan tambahan yakni Kepala Urusan Pembangunan, Tokoh Masyarakat dan Pemilik Objek Wisata dan Wisatawan.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif.

1.4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.4.1 Deskripsi Negeri Sawai

Negeri Sawai adalah sebuah Negeri terpencil yang terletak di pantai utara pulau Seram, Dimana kehidupan masyarakat Negeri Sawai sama seperti masyarakat

Pulau Seram pada umumnya dan Negeri ini terbentuk sebelum Portugis menginjak kaki di Negera kesatuan Republik Indonesia.

Negeri yang dengan nama aslinya adalah “KONIARI“ memiliki arti tersendiri. Salah satu Negeri tua dipantai Utara pulau Seram, sudah tentu memiliki berbagai sejarah tersendiri.

Masyarakat Negeri Sawai terdiri atas empat Marga/Soa dan beberapa Etnis yang mendiami pelataran ini, Empat marga itu adalah :

1. Marga Musiin
2. Marga Rumasoreng
3. Mara Ipaenin
4. Mara Letahiit

Dari empat Marga tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas tersendiri yang tidak terpisahkan dari kepentingan Negeri ini. Di sebuah Negeri adat sudah tentu ada system pemerintahan pada zaman dulu seperti halnya negeri adat yang ada di wilayah RI yang di kenal dengan Raja dan Hulubalang, Begitu pula Negeri Sawai dalam sistem pemerintahan adat, Itu di kenal dengan Raja, Kapitan dan Ketua Adat.

Untuk menjadi Raja adalah sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat yaitu ; Mata Ruma Perintah atau Keturunan Perintah yakni Ipaenin, Kemudian untuk memangku gelar Kapitan yaitu hanya di bolehkan kepada orang asli yang mendirikan Negeri ini yaitu Marga Muslim, dan yang bertugas untuk memangku Ketua Adat adalah bisa untuk semua marga yang ada di Negeri Sawai.

Untuk Etnis di Negeri Sawai adalah Etnis Alifuru sebagai suku asli di Pulau Seram pada umumnya dan juga beberapa suku campuran yang ada di negeri Sawai boleh di katakan bahwa hampir semua suku di Indonesia telah mendiami Negeri ini.

Sistem pemerintahan di Negeri Sawai adalah kerajaan yang di kepalai oleh seorang Raja dan di bantu oleh para Staf. Kemudian pada zaman Pemerintahan Belanda telah di kenal dengan nama RHENSHAF atau anak DUSUN.

Adapun Dusun-Dusun itu adalah; Rumaolat, Masihulan, Opin, Sawai (sekarang Desa Administratif) dan Dusun Perluasan Sawai Olong. Dari lima Dusun itu dalam sistem pemerintahan ada di dalam kontrol Negeri Induk Sawai baik dari sisi pelayanan administrasi maupun dari wilayah petuanan, itu semua di bawa pengaturan negeri Induk Sawai.

Terlepas dari system ketrikatan diatas Negeri Sawai pada zaman dulu juga mempunyai beberapa anaknegeri yang ada di pantai utara pulau seram ini, Namun dari perkembangan zaman, dari anak-anak negeri ini ada yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tatan adat ini sesuai dengan janji para leluhur dan sebagian telah mengkhianati petua-petua para Datuk datuk dengan alasan atau karangan cerita yang tidak jelas.

Kebudayaan dipandang sebagai hasil karya, karsa dan ciptaan manusia. Negeri Sawai adalah sebuah negeri Adat yang terwarisi Negeri Sawai tidak memiliki Budaya/hubungan Pela dengan negeri lain. Masyarakat adat Sawai secara hakiki, memiliki Falsafah adat dan budaya "*Sagu Salempeng Patah Dua*", dengan melambangkan ciri hakiki dari kekuatan dan/atau perjuangan untuk mempertahankan "*Negeri*". Dalam hubungan baik antar masyarakat adat pada Negeri- negeri ini semakin kuat hubungannya, maka corak hubungan tersebut dilukiskan dengan Prototy masyarakat adat dan budaya Negeri Sawai.

Semakin diperkuat pula dengan berbagai hasil karya, karsa dan cipta

dimana salah satu unsur budaya (kesenian) yang sangat menonjol antara lain tari cakalele, tari kahua (mako-mako), tari Pukari, Tarian Sewa, permainan rakyat dan hela rotang, ciri khas yang lain sebagai jati diri Negeri Sawai adalah Bahasa Adat/Tanah.

1.4.2. Tingkat Pembangunan Lokasi Wisata di Pantai Sawai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Pembangunan suatu kawasan wisata secara lokal, regional maupun tingkat nasional berdampak pada pembangunan perekonomian, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Dalam hal ini, pembangunan dan pengembangan suatu kawasan wisata dilaksanakan untuk memperbaiki produk wisata ataupun menambah produk wisata, yang kemudian akan memberikan pemasukan bagi daerah serta masyarakat, dengan memperhatikan faktor internal yakni: kekuatan/kelebihan yang dimiliki, faktor eksternal yakni berbagai peluang dan tantangan sehingga strategi yang dilakukan efektif dan efisien.

Pembangunan Lokasi Wisata Pantai Sawai pada mulanya dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebelum terjadinya konflik di Maluku tahun 1999, terlepas dari tahun 1999 pengembangan dan pembangunannya dialih fungsikan oleh pemerintah Negeri

Sawai itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, namun pembangunannya dinilai tidak memenuhi kebutuhan wisatawan.

Pemerintah Negeri Sawai belum optimal dalam melaksanakan pembangunan lokasi Wisata pantai Sawai dikarenakan terlihat pada lokasi wisata pembangunan yang ada belum sesuai dengan standar dan kemajuan yang signifikan “Pembangunan tidak ada pengaruh dari pengembangan pembangunan wisata pantai Sawai karena fakta yang ada retribusi yang dilakukan oleh tenaga pemuda negeri sangat tidak profesional, dimana pungutan yang dilakukan hanya dilakukan sesuka individu sehingga tidak ada kontribusi yang dilakukan dengan baik sebagai modal dalam peningkatan pengembangan kawasan pariwisata tersebut, mestinya dibuat regulasi dalam pengelolaan pengembangan pembangunan parawita tersebut .

Selain itu sarana penunjang baik itu seperti “Home stay dan lahan parkir juga belum memiliki standart minimal pengembsngan pembangunan parawisata sehingga memberi peluang dan minat bagi wisatawan lokal maupun internasional hal kini sangat mempengaruhi proses pengembangan kawasan tersebut.

Proses pengembangan wilayah parawisata pantai yang baik, perlu adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah untuk mendukung, swebab dengan keterbatasannya modal pemerintah negeri maupun pengusaha lokal yang mencoba melakukan potensi sumberdaya alam yang menjanjikan kalau tidak didukung oleh pemerintah kabupaten selaku mitra dalam hal ini membantu menyiapkan sara pendukung yang layak bagi pengembangan parawisata tersebut juga sangat mempengaruhi pengembangannya. Sarana

prasarana penunjang utama adalah fasilitas yang sangat fital seperti transportasi, Home Stay, dengan standar yang layak bagi pengembangan parawisata dimaksud.

Pemerintah negeri Sawai belum optimal dalam memanfaatkan sumber daya pariwisata pantai, serta pengaruh dari pembangunannya terhadap pendapatan negeri dan kemajuan dari pembangunan lokasi wisata pantai berhubung karena pengalokasian Dana Desa masih diperuntukan untuk peningkatan kapasitas pemerintah negeri, pemberdayaan masyarakat, dan program lainnya diakui bahwa pengembangan pembangunan pariwisata laut dan pantai, kami membutuhkan subsidi pemerintah berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah kabupaten yang memiliki sumberdaya manusia yang cakap dalam petrencanaan dan pembangunan infra struktur bagi pengembangan parawisata dan ini kan juga menunjang pendapatan daerah dan juga pendapatan di Negeri termasuk didalamnya ada pemanfaatan yang didapat oleh masyarakat, walaupun ada keinginan dari pemerintah daerah kami masyarakat siap untuk membagi hasil pendapatan yang ada.

Terkait dengan home stay kami akui masyarakat sangat terbatas modal sehingga melakukan rumah rumah dekat wilayah wisata pantai yang layak atau dengan kata lain layak bagi parawisatawan, walaupun ada subsidi pemerintah dalam pengertian dibangun oleh pemerintah dan menjadi Utang masyarakat maupun negeri kami yakin maka ada sarana prasarana penunjang yang layak.

Home stay yang diharapkan sudah memiliki standar yang minimal khususnya bagi kawasan kepulauan, ada tempat tidur yang memadai, kamar kecil mandi/wc, tempat parkir, WIFI, pasar yang mensuplay kebutuhan wisatawan, dan lain

lainnya.

Lebih lanjut dikemukakan masyarakat dalam hal ini pemerintah negeri memiliki kerinduan yang tinggi bahwa potensi ini merupakan salah satu faktor penunjang bagi pemerintah negeri maupun masyarakat secara keseluruhan sebab jika ini dikelola dengan baik maka merupakan sumber pendapatan yang sangat menunjang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diakui lebih lanjut bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah negeri serta masyarakat yang berada pada wilayah sekitar lokasi wisata laut dan pantai, selama ini telah berupaya dan diakui hanya segelintir orang yang memiliki modal yang dapat dilakukan dan ini mestinya diupayakan supaya minimal sebagian masyarakat menikmati ini merupakan suatu kerinduan masyarakat sekitar.

Selaku pemerintah Negeri seperti yang jelaskan diatas bahwa perencanaan suatu potensi sumberdaya wisata laut dan pantai memiliki kerjasama yang baik antara instansi, pemerintah serta stakeholder serta masyarakat pemilik sumberdaya alam yang dimiliki. Sering Sumberdaya yang dimiliki hanya dikuasi oleh pemilik modal dari luar wilayah pemilik sumberdaya alam tersebut karena keterbatasan modal maka mereka hanya sebagai penonton dan tenaga kerja lepas di sumberdaya yang dimiliki. Kondisi ini mestinya dihindari selaku pemerintah Kabupaten yang memiliki otoritas kewenangan dalam proses pendampingan serta mendorong sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penonton di wilayah mereka. Kekuatiran yang selama ini dirasakan pemilik sumberdaya adalah ketidak berpihakan pemerintah kabupaten pada masyarakat, begitupun pemerintah negeri yang belum memiliki kemampuan

perencanaan dan pengelolaan sumberdaya potensi wisata laut dan pantai, misalnya dalam memproteksi potensi tersebut, serta menata dengan mengatur kelompok ataupun organisasi pengelolaan walaupun terbatas pada retribusi dari potensi potensi wisata tersebut.

1.4.3. Tingkat Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Pantai Sawai.

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan . peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan objek wisata adalah mengembangkan potensi alam yyang dimiliki oleh suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Melalui objek wisata yang baik dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana mampu meningkatkan kualitas objek wisata sehingga mampu menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti sistem pengairan, komunikasi, keamanan, atau pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik disuatu daerah tujuan wisata, akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Sarana dan prasarana wisata adalah ujung tombak usaha kepariwisataan, dikarenakan hal tersebut merupakan pendukung selain sumber daya wisata yang

memadai.

Pemerintah Kabupaten yang merupakan salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam upaya pengelolaan Pengelolaan Objek Wisata khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah.

Masalah pengelolaan sarana dan prasarana dipantai sawai belum dikatakan efektif karena pengelolanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat masih minim akan pengetahuan wisata guna menjawab kebutuhan wisatawan lokal, regional maupun internasional.

Salah satu tugas dan tanggungjawab yang mestinya menjadi perhatian Instansi tersebut melakukan pendampingan bagi pemerintah negeri dan masyarakat pemilik potensi tersebut, sehingga dapat melakukan upaya upaya yang sifatnya memberi rangsangan kepada mereka sehingga potensi yang dimiliki memberi peluang bagi pengembangan ekonomi pemerintah negeri maupun masyarakat. Dikatakan oleh Pemerintah Kabupaten bahwa masyarakat belum siap dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan dimaksud.

Ketidaksiapan pemerintah negeri dan masyarakat bukan merupakan hal yang baru dalam upaya pengembangan potensi potensi sumberdaya wisata yang dimiliki. Tetapi upaya pendampingan harus dilakukan secara terus menerus selaku pemerintah daerah yang memiliki sumberdaya manusia, dana yang memadai. Minimal ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dengan memberi pelatihan dan traning traning bahkan memberi peluang kepada mereka untuk belajar pada daerah lain yang sudah berhasil dalam pengembangan potensi sumberdaya wisata yang dimiliki.

Hal lain yang juga merupakan

tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait adalah memberikan juga pemahaman bagi masyarakat bagaimana mengelola potensi tersebut misalnya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, termasuk di dalamnya lingkungan kawasan kawasan pariwisata dimana tetap bersih dari sampah, kehidupan sosial budaya masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang ketertarikan wisatawan, melakukan publikasi dan sarana prasarana penunjang lainnya yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten.

Proses sosialisasi ini mestinya dilakukan secara terpadu dari pemerintah kabupaten sehingga memberi stimulus kepada masyarakat dalam berupaya mengelolanya. Hal ini diakuoi bahwa belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah kabupaten seab Maluku Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas wilayah yang cukup besar sehingga perencanaan dan pengelolaan kawasan kawasan wisata sangat diharapkan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Sebab kalaupun ini hanya diharapkan dari pemerintah kabupaten maka hal ini harus dilakukan secara bertahap.

Pemerintah Negeri Sawai belum efektifnya terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana, diakui dengan adanya potensi wisata ini di kenal oleh masyarakat diluar Masyarakat Sawai sebagai salah satu kawasan yang indah maka berbondong bondong wisatawan lokal maupun regionel bahkan torfis dari beberapa negara berkunjung dengan memang tidak ada sarana prasarana yang layak atau memadai, peluang itu dimanfaatkan oleh masyarakat lokal seadanya dan ini memang diakui bahwa

mereka mereka yang mampu membaca peluang ini rata rata memiliki modal yang cukup dalam pengertian terbatas dan memanfaatkan apa yang dimiliki oleh mereka untuk menerima peluang tersebut. Sedangkan dari pemerintah negeri juga belum siap secara baik dalam memanfaatkan peluang ini, diakui lebih lanjut bahwa ketrlambatanm pemerintah negeri membaca peluang ini belum didukung oleh sumber daya keuangan negeri yang baik.

Selain itu juga pemerintah negeri mengakui bahwa ada persoalan penguasaan kawasan kawasan wisata tersut bukan merupakan milik negeri tetapi dimiliki oleh maerga marga yang memang secara hak ulayat mereka miliki sehingga pemerintah negeri hanya berupaya menunjang dan menjaga keamana dan ketentraman kawasan kawasan tersebut. Memang ada upaya untuk dilakukan peraturan negeri yang terbatas hanya untuk melakukan pengawasan dan pendampingan bagi masyarakat pemilik kawasan tersebut sehingga ada pemasukan di pemerintah negeri dan itu hanya terbatas pada retribusi memang ini belum diatur sebab butuh kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat pemilik.

Lebih lanjut dikatakan bahwa memang semuanya itu perlu adanya keutuhan dari pada pemerintah negeri sebab selama ini di Negeri Sawai Pemerintah Negeri sering mengalami konflik internal terkait dengan kepemimpinan sehingga untuk mendapat keseriusan dalam mengelolanya, apalagi ketika pemerintah yang memimpin tidak didukung oleh pemilik pemilik tempat atau lokasi tersebut, ini merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh pemerintah negeri Sawai.

1.4.4. Peran Serta Masyarakat.

Dalam mengembangkan objek wisata di Negeri Sawai Kabupaten Maluku Tengah sangat penting dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung upaya pengembangan pariwisata di Negeri, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar itu sendiri.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, Pemerintah Negeri melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, yaitu:

1. Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata;
2. Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan khususnya;
3. Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mungkin mengadakan kerja bakti bersama-sama;
4. Ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek wisata, budaya kuliner, dan lain-lain; serta
5. Keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Adanya peran langsung dari Pemerintah Negeri berupa bimbingan dan keterlibatan terjun ke lapangan tempat wisata yang juga ikut meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Partisipasi masyarakat berupa ikut menjaga kebersihan dan keamanan di objek wisata.

Adanya hubungan baik antara Pemerintah Negeri dengan masing-masing

pengelola ketiga objek wisata di Negeri Sawai Kabupaten Maluku Tengah. Hubungan baik ini bisa dilihat lewat keaktifan para pengelola objek wisata dalam menyeter dana retribusi kepada pemerintah Negeri, serta koordinasi dinas pariwisata dengan para pengelola objek wisata dalam event-event tahunan sebagai sarana promosi objekwisata.

Salah Satu Pengelolah Objek Wisata di Negeri Sawai menyatakan sebagai berikut:

Faktor yang mempengaruhi tidak dan lancarnya pembangunan pariwisata di Negeri Sawai Kabupaten Maluku Tengah adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib di dahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran dibidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah sendiri.

Bagi objek wisata yang berada jauh dari pusat kota yang ada di Negeri Sawai sulit dijangkau wisatwan dengan kendaraan umum. Hal ini dikarenakan letaknya yang cukup jauh dan kurangnya akses langsung dari pusat kota ke objek wisata.

Kesulitan yang dialami wisatawan khususnya wisatawan asing adalah minimnya informasi mengenai suatu objek wisata, serta tidak dimaksimalkannya Tourist Information center. Sehingga para wisawatan harus mencari informasi sendiri mengenai objek wisata, letaknya dan apa saja yang ditawarkan dari objek wisata tersebut.

KESIMPULAN

1.5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Negeri Sawai belum optimal dalam rangka memanfaatkan sumber daya pariwisata pantai Sawai khususnya sarana dan prasarana penunjang.
2. Masih rendahnya dukungan pemerintah Kabupaten khususnya instansi terkait dalam menunjang sarana prasarana penunjang dimaksud, serta pendampingan dalam pengelolaan.
3. Sosialisasi dan publikasi objek wisata masih belum optimal.
4. Penguatan Kapasitas Pemerintah negeri dalam menunjang pengembangan dan pengelolaan parawisata laut dan pantai.
5. Partisipasi Masyarakat dalam menunjang pengembangan parawisata sebagai sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Awaluddin, M., & Salam, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770>
- Dewi Kusuma Sari. (2011). Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang. *Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*, 2–87.
- Ely, A. J., Henaulu, A. K., & Umanailo, M. C. B. (2020). Sustainable traditional cultural for tourism fisherier with canvas business model on the Ambon Island. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 0(March), 2561–2567.
- Henaulu, A K, Ardian, S., & Ely, A. J. (2020). Kualitas Pelayanan Bagi Wisatawan Difabel Di Daerah Wisata Bahari Menggunakan Servqual Method.

- PROFICIENSI: The Journal of the ...*, 8(2), 154–163.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnalprofisiensi/article/view/2817>
- Henaulu, Agung K., Syarifudin, B., & Gunarta, I. K. (2016). Strategi Pengembangan Industri Pariwisata berbasis Kepulauan Menggunakan Sistem Dinamik Dengan Mempertimbangkan Dampak Sosial Ekonomi. *Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIV*, 1–8.
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones.
- Ismiyanti. (2010). *Pengantar pariwisata* (1st ed.). Grasindo, Jakarta.
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SPAR4101-KDT.pdf>
- Lelloltery, H., Pujiatmoko, S., Fandelli, C., & Baiquni, M. (2016). Pengembangan Ekowisata Berbasis Kesesuaian Dan Daya Dukung Kawasan Pantai (Studi Kasus Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat). *Jurnal Budidaya Pertanian*, 12(1), 25–33.
- Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. In *UPP STIM YKPN, Yogyakarta* (2nd ed.).
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. In *ALFABETA BANDUNG*. ALFABETA BANDUNG.
http://perpustakaan.bppsdmk.kemkes.go.id/index.php?p=show_detail&id=4828
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. 2.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnal/lekseskutip/article/viewFile/18676/18208>
- Rochajat Harun, E. A. (2017). *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kaji Ulang, Dan Teori Kritis* (1st ed., Issue 3). RajaGrafindo Persada : Jakarta.
<http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.p>
- [hp?p=show_detail&id=3198](http?hp?p=show_detail&id=3198)
- Salampessy, H., & Kaisupy, T. D. (2020). PENGARUH CITY BRANDING TERHADAP CITY IMAGE DI KOTA AMBON. *Gorontalo Management Research*, 3(2), 227–241.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32662/gomares.v3i2.1183>
- Silalahi, U. (2011). Asas-Asas Manajemen. In *Asas-asas Manajemen*.
- Sugiama, A. G. (2021). Ecotourism: Pengembangan Pariwisata berbasis konservasi alam. In *Guardaya Intimarta, Bandung*. Guardaya Intimarta, Bandung.
- Tahun, P. P. (1990). Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. Sekretariat Negara. Jakarta
- UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah..